

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan beberapa variabel independen yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu, sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, dan anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Temanggung. Sampel dalam penelitian ini adalah aparatur daerah di 24 OPD Kabupaten Temanggung yang diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 114 kuesioner yang dapat diolah. yang dapat diolah. Berdasarkan Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung” adalah sebagai berikut :

1. Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Temanggung. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dituntut untuk memberikan informasi yang handal, apabila sistem pelaporan yang dimiliki pemerintah tidak baik maka informasi yang dihasilkan dapat menyesatkan masyarakat yang memiliki kepentingan. Dengan sistem pelaporan yang handal maka dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Temanggung. Hal

ini menunjukkan bahwa dengan pengendalian akuntansi yang handal dan dilakukan dengan baik maka informasi akuntansi yang diperoleh akan semakin valid dan dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Dengan adanya informasi akuntansi yang valid maka akan menambah kepercayaan para stakeholder yang pastinya akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Temanggung. Penerapan anggaran berbasis kinerja yang baik, diharapkan dapat menjadi evaluasi baik dari segi ekonomi, efisiensi dan efektivitas atas target yang ditetapkan dan menjadi perbaikan untuk periode selanjutnya. Dengan adanya anggaran berbasis kinerja yang efektif maka dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, hasil penelitian ini mendukung semua hipotesis yang disusun sehingga dengan demikian tujuan penelitian tercapai dan hasil penelitian konsisten dengan penelitian – penelitian sebelumnya. Berdasarkan uji koefisien determinasi nilai adjusted $R^2 = 0.692$ yang berarti bahwa 69,2% variabel-variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan oleh sistem pelaporan (X1), pengendalian akuntansi (X2), dan anggaran berbasis kinerja (X3), sedangkan 30,8% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Hasil pengujian sejalan dengan hipotesis yang membuktikan bahwa ketiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pengaruh

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jika dikaitkan dengan masalah yang sudah dijelaskan pada latar belakang penelitian, maka penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Perlunya penyajian laporan keuangan yang handal serta penyajian informasi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan umum serta dapat dipahami oleh penggunanya. Lalu adanya otorisasi dari pihak yang berwenang dengan didukung bukti transaksi yang valid dan sah serta dicatat dalam buku catatan akuntansi dan adanya pemisahan batasan wewenang serta tanggung jawab yang jelas dalam menjalankan aktivitas organisasi dan laporan keuangan juga direview dan disetujui terlebih dahulu oleh kepala subbagian keuangan/akuntansi sebelum didistribusikan. Perlunya penyajian program dan kegiatan dengan jelas dan terdapat pemisahan antara lembaga kontrol dan lembaga pengguna anggaran sehingga pengguna anggaran berfokus pada tanggung jawabnya atas output baik volume, waktu pengerjaan maupun kualitasnya serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan baik terhadap capaian ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Apabila ketiga hal tersebut dapat diterapkan dengan baik maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang tentunya juga akan meningkatkan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

5.2. Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat keterbatasan.

Keterbatasan tersebut antara lain :

1. Kesulitan dalam mengumpulkan kembali kuesioner yang telah disebar dikarenakan kesibukan responden.
2. Subjek penelitian ini terbatas pada aparatur pemerintah di OPD Kabupaten Temanggung, sehingga akan terdapat perbedaan hasil penelitian dan kesimpulan apabila dilakukan pada subjek penelitian yang berbeda.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan, maka saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya pada saat melakukan penyebaran kuesioner lebih memperhatikan waktu penyebaran kuesioner, agar kuesioner yang diberikan tidak terlalu lama di kantor OPD dan tertumpuk dokumen lain.
2. Bagi pihak aparatur pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dalam meningkatkan sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, dan anggaran berbasis kinerja dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga capaian kinerja setiap OPD dapat meningkat sehingga nilai SAKIP juga dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. F. (2005). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Agustin, K. (2018). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta)*. Yogyakarta: Skripsi : Universitas Islam Indonesia.
- Akbar, N. B. (2020, Maret 6). *InfoPublik* . Retrieved from infopublik.id: <https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/439816/SAKIP-arrah-baru-anggaran-yang-efektif->
- Anggarini, & Puranto, H. (2010). *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komperhensif*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* . Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Bernadine, R. (2018). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten*. Yogyakarta: Skripsi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, J. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman - Pengalaman* . Edisi 6. Yogyakarta: BPF.
- Hasibuan, J. R. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada SKPD Padang Lawas)*. Medan: Skripsi : Universitas Sumatera Utara.
- Hoesada, J. (2016). *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Indrajit. (2001). *Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object*. Bandung: Informatika.
- Ismail, & Idris. (2009). *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta: Indeks.
- Ismaya, S. (2005). *Kamus Akuntansi*. Bandung: Pustaka Grafika.
- Jensen, C. M., & Meckling, W. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, No. 3, 305-360.
- Kholis, B. N. (2007). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Yogyakarta: Skripsi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. (2003). *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Mahsun, M. (2007). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardismo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* . Edisi IV. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi* . Edisi Keempat. Jakarta: Salemba 4.
- Mulyani, T. (2020, Maret 17). [temanggungdaily](https://temanggungdaily.com/2020/03/pemkabtemanggung-komitmen-upayakan-perbaikan-sistem-akuntabilitas-kinerja-instansipemerintah/). Retrieved from [temanggungdaily.com](https://temanggungdaily.com/2020/03/pemkabtemanggung-komitmen-upayakan-perbaikan-sistem-akuntabilitas-kinerja-instansipemerintah/)
- Nanda, R., & Darwanis. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*.
- Pedoman Reformasi dan Penganggaran. (2009).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Pasal 265 ayat 2 .
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.01/2012 tentang Penunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Permendagri No.21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Pusdiklatwas BPKP. (2007). *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Jakarta.

Putri, D. R. (2018). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat)*. Bandung: Skripsi : Universitas Komputer Indonesia.

Rasul, S. (2003). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Safitri, N. H. (2020). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Yogyakarta: Skripsi : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

Sarmin, N. F. (2019). *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap AKuntabilitas Kinerja Pemerintah Studi Kasus pada SPKD Kab. Maneje*. Makasar: Skripsi : Universitas Muhammadiyah Makasar.

Sekaran , U. (2003). *Research Method for Business : A Skill Building Approach*. New York: John Willey & Sons, INC.

Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univesity Press.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.